

# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI  
GORONTALO  
2020

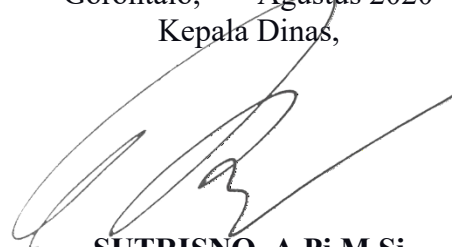
### KATA PENGANTAR

Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, yang diarahkan untuk mewujudkan “*Visi Provinsi Gorontalo tahun 2021*”.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan Rencana Kerja serta kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, melalui target rencana kerja dan pencapaian kinerja ini, dapat dengan mudah dipedomani untuk lebih meningkatkan kinerja.

Olehnya itu demi terwujudnya apa yang dicita-citakan, melalui Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam mekanisme tata kelola sistem Anggaran dan rencana kerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gorontalo, Agustus 2020  
Kepala Dinas,



**SUTRISNO, A.Pi M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630425 198603 1 018

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

SK Kepala Dinas Tentang RENJA 2021 .....iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 6

1.4. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN DAN RENJA OPD .....10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD .....10

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... 12

Masalah dan Solusi .....14

Hal-hal yang dilaporkan .....14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 .....22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 29

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja..... 31

3.3. Program dan Kegiatan ..... 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN .....34

BAB V PENUTUP.....38

LAMPIRAN:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian  
RENSTRA OPD sampai dengan Tahun 2019

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Urusan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 merupakan periode perencanaan pembangunan jangka menengah tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana pembanguan urusan pangan tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pangan tahun 2022 ini, penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2014 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap OPD. Rencana kerja perangkat daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 72 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Gorontalo dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja OPD mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja Dinas Pangan tahun 2022 disusun melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rancangan Renja, 2) penyusunan rancangan awal Renja, 3) penyempurnaan rancangan renja, 4) penyusunan rancangan akhir, 5) verifikasi rancangan renja dan, 6) penetapan Renja Dinas Pangan tahun 2022.

Mendukung terwujudnya *Good Governmance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
- Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Lebih lanjut disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur. Pelaksanaan perencanaan adalah suatu yang sangat penting peranannya dalam rangka menentukan arah dan percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 125 yang mewajibkan OPD untuk menyusun Rencana Kerja, sehingga Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai dokumen tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat, perencanaan tahunan/Renja Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait yang dilaksanakan di daerah.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
16. Peraturan presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan panganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 Provinsi Gorontalo;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perubahan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung menjadi Dinas Pangan.
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
26. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
27. Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
28. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerahh Tahun 2022

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN



**1.3.1. MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan perencanaan selama tahun 2022. Selain itu dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 juga untuk mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan kabupaten/kota serta sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJPD 2007 - 2025.

**1.3.2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan tahun 2022 ini adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan sekaligus alat kontrol dalam mengendalikan SDM aparatur dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
3. Menyediakan instrumen yang akan dijadikan sebagai pedoman setiap SDM aparatur di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi selama setahun.
4. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan.
5. Menjadikan instrumen sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pangan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
6. Menjadikan alat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sasaran program/kegiatan lintas Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholder* di sektor perencanaan pembangunan daerah.
7. Sebagai alat untuk mengukur tingkat capaian sasaran program/kegiatan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJPD 2007 - 2025;

**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 serta penjelasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pangan yang meliputi Sub Bab ;

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN, dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, yang dikaitkan dengan capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan beserta isu-isu yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan, serta kajian terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan masyarakat, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pangan, yang meliputi Sub Bab ;

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, dalam bab ini diawali dengan kajian kebijakan nasional yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, kajian terhadap isu-isu penting yang mendasari perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pangan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, yang meliputi Sub Bab;

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD, bab ini menguraikan tentang rencana kegiatan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang beserta dengan pendanaan.

BAB IV PENUTUP, Bab ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

### II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

#### a. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu (2020) dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. Dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 dan capaian RENSTRA 2018 – 2022 Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang menjadi urusan wajib adalah sebagai berikut:

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Proovinsi

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran

#### II. Program Program Penanganan Kerawanan Pangan

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota
- b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- c. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kreawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

### III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- b. Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- d. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Sub Kegiatan Promosi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- e. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Sub Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi

### IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- b. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dan sejauh mana target kinerja dan capaian tahun lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (RENSTRA Dinas Pangan) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagaimana terlampir.

Secara umum Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2020 telah mendapatkan pagu awal APBD

Provinsi sebesar Rp. 4.074.477.000,- kemudian karena adanya wabah *Corrona Virus* maka pada bulan Mei 2020 terjadi refocusing anggaran sebesar Rp. 1.652.347.000,- sehingga pagu yang tersisa adalah Rp. 2.422.130.000,- dan kemudian pada Bulan Oktober 2020 melalui anggaran APBD-Perubahan kembali mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- sehingga pagu akhir berjumlah Rp. 2.472.130.000,- dengan capaian realisasi sejumlah Rp. 2.454.515.846,- atau sebesar 99.29%.

Adapun rincian program dan kegiatan APBD pada tahun anggaran 2020 selang bulan Januari s.d Desember khusus untuk Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pangan Provinsi Gorontalo) antara lain sebagai berikut :

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Proovinsi**

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pagawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran

### **II. Program Program Penanganan Kerawanan Pangan**

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota
- b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- c. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kreawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

### III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- b. Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- d. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Sub Kegiatan Promosi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal
- e. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Sub Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi

### IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- b. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pangan, sebagaimana terlihat pada tabel T-C.29 berikut ini :



## BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

**Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2021, OPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1))	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=((10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
2.09.01.1.05	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek (Dinas dan UPTD)	5 Aparat Petugas	5 Aparat Petugas	5 Aparat Petugas	15 Aparat Petugas	300%	-	40 Aparat Petugas	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	4 Kegiatan	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Tahun	4 Kegiatan	
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	

## BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

2.09.01.1.01	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.09.01.1.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 % dan 2 Dokumen	100 % dan 2 Dokumen	98,54% dan 2 Dokumen	98,54% dan 2 Dokumen		100 % dan 2 Dokumen		
2.09.01.1.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pangan Tahun 2022	6,518,051,301	6,518,051,301	6,848,304,143	6,748,177,366	98.54%	5,963,976,176		
2.09.01.1.02.07	2. Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	27 Daerah Rawan Pangan	14 daerah Rawan Pangan	27 Daerah Rawan Pangan	16 Daerah Rawan Pangan	55.56%	27 Daerah Rawan Pangan	62 Daerah Rawan Pangan	
		Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)	1500 KK	1500 KK	1500 KK	2350 KK	156.67%	1250 KK	6150 KK	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	tenaga pengelola analisis ketersediaan yang berkualitas	6 Tenaga Analisis	6 Tenaga Analisis	6 Tenaga Analisis	2 Tenaga Analisis	33.33%	2 Tenaga Analisis	14 Tenaga Analisis	
		Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	6 Dokumen Laporan	6 Dokumen Laporan	100%	4 Dokumen Laporan	17 Dokumen Laporan	
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota	Jumlah tenaga analisis yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6 Tenaga Analisis dan 5 Dokumen Laporan	6 Tenaga Analisis dan 5 Dokumen Laporan	6 Tenaga Analisis dan 7 Dokumen Laporan	2 Tenaga Analisis dan 7 Dokumen Laporan	33.33 % dan 100%	2 Tenaga Analisis dan 4 Dokumen Laporan	14 Tenaga Analisis dan 17 Dokumen Laporan	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang ditangani Ketersediaan Pangannya	27 Daerah Rawan Pangan	14 Daerah Rawan Pangan	27 Daerah Rawan Pangan	16 Daerah Rawan Pangan	55.56%	27 Daerah Rawan Pangan	62 Daerah Rawan Pangan	
2.09.04.1.02.01	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)	1.500 Paket	1.500 Paket	1.500 Paket	2.350 Paket	156.67%	1250 Paket	6150 Paket	
2.09.04.1.02.02	2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Krawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)	27 LKD	15 LKD (Kios Akses Pangan)	27 LKD	0	Pagu anggaran di refocusing	15 LKD	38 LKD (93 Kios Akses Pangan)	

## BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

2.09. 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP		Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP		
		Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 0.94%, Cabe 46.09%, Bawang Merah 2.72%, Gula Pasir 2.49%, minyak goreng 54.49%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 0.82%, Cabe 23.43%, Bawang Merah 20.85%, Gula Pasir 12.10%, minyak goreng 7.09%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat			CPP 50 Ton, CPM 106 Ton	CPP 6 Ton, CPM 21 Ton	CPP 12 % dan CPM 19.81%	CPP 15 Ton, CPM 5 Ton	CPP 14 Ton, CPM 68.5 Ton	
2.09. 03. 1.01	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan dan Jumlah Komoditas Pangan dengan Harga Stabil	18 Gapoktan dan 5 Komoditi	13.5 Ton (18 Gapoktan 750 Kg/Gpktn) dan 5 Komoditi	CPM 50 Ton dan 5 Komoditi	CPM 6 Ton, 1 TTIC dan 6 Komoditi	CPM 20 %, 1 TTIC dan Komoditi 120%	CPM 5 Ton, 1 TTIC dan 6 Komoditi	CPM 42.5 Ton, 3 Unit TTIC dan 6 Komoditi	
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.	6 Gpktn	6 Gpktn, 1 TTIC	4 Gapoktan	6 Gapoktan, 1 TTIC	150%	-	15 Gapoktan	
		Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	6 Komoditi	120%	5 Komoditi	6 Komoditi	
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200%	2 Laporan	6 Laporan	
		Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan	18 Gapoktan	18 Gapoktan	50 Ton	10 Ton	20%	5 Ton	CPM 42.5 Ton	
2.09. 03. 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	100 Ton	5 Ton	CPP 50 Ton dan CPM 56 Ton	CPP 6 Ton dan CPM 11 Ton	CPP 12 % dan CPM 19.64%	CPP 15 Ton, CPM 0	CPP 14 Ton, CPM 26 Ton	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	100 Ton	5 Ton	CPP 50 Ton dan CPM 56 Ton	CPP 6 Ton dan CPM 11 Ton	CPP 12 % dan CPM 19.64%	CPP 15 Ton	CPP 14 Ton, CPM 26 Ton	
		Gudang Cadangan Pangan Provinsi	DED	-	Pembangunan dan Pengisian	-	-	-		

## BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

2.09. 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kcal/kapita/hari)	2070	2412	2150	2453	114.1%	2,150		
		persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	56.2	69.68	56.40%	71.90%	127.48%	56.6		
		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	7 Sampel 3 Sertifikat/ Registrasi	12 Sertifikat/ Registrasi	5 Sertifikat/ Registrasi	5 Sertifikat/ 13 Registrasi	360%	5 Sertifikat/ Registrasi		
2.09. 03. 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	10 KRPL dan 2 Keg B2SA	10 KRPL dan 2 Keg B2SA	10 KRPL dan 2 Keg B2SA	10 KRPL dan 3 Keg B2SA		100 RTM, 5 Paket P2L Hidroponik, 10 Paket P2L Vertikultur, 2 Kegiatan	40 KRPL, 10 P2L Hidroponik, 2 Unit PMS, 10 P2L Vertikultur	
2.09.03.1.04.01	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL	10 KRPL, 5 OPAL Hidroponik, 2 Unit PMS	170%	100 Mahyani, 5 Paket P2L Hidroponik, 10 Paket P2L Vertikultur	40 KRPL, 10 P2L Hidroponik, 2 Unit PMS, 10 P2L Vertikultur	
		Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 kl Promosi B2SA	150%	2 kegiatan	9 Kegiatan	
2.09.03.1.04.03	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	
		Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya	10 Petugas	8 Petugas	10 Petugas	2 Petugas	20 %	2 Petugas	32 Petugas	
2.09. 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	3 Sertifikat/ Registrasi	8 Sertifikat/ 4 Registrasi	3 Sertifikat/ Registrasi	5 Sertifikat dan 13 Registrasi	360%	5 Sertifikat/ Registrasi	24 Sertifikat dan 26 Registrasi	
2.09. 05. 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	6 Dokumen	6 Dokumen dan 7 Sampel PSAT	6 Dokumen	6 Dokumen dan 49 Sampel PSAT		6 Dokumen	18 Dokumen dan 83 Sampel	
2.09.05.1.01.01	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Dokumen Kelembagaan Keamanan Pangan	6 Dokumen	6 Dokumen dan 7 Sampel PSAT	6 Dokumen	6 Dokumen dan 49 Sampel PSAT	100 %	6 Dokumen	18 Dokumen dan 83 Sampel	
2.09.05.1.01.04	2 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	3 Sertifikat/ Registrasi	8 Sertifikat/ 4 Registrasi	3 Sertifikat/ Registrasi	5 Sertifikat dan 13 Registrasi	360 %	5 Sertifikat/ Registrasi	24 Sertifikat dan 26 Registrasi	

### c. Masalah dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 khususnya untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain :

#### • Permasalahan

1. **Bidang Sekretariat :** Anggaran untuk perbaikan kantor sangat terbatas jika dilihat dari tingkat kerusakan yang ada antara lain : ada beberapa atap yang bocor, saluran kamar kecil yang tersumbat, kendaraan dinas operasional yang sudah tua sehingga membutuhkan perawatan yang mahal, kondisi ruang rapat yang kurang memadai karena sudah banyak tirai yang jatuh.
2. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :** Masih banyak masyarakat yang terindikasi mengalami rawan pangan berdasarkan data FSVA Tingkat Provinsi Gorontalo yang membutuhkan intervensi pemerintah
1. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan :** Masih sering terjadi lonjakan harga pangan dan kelangkaan pasokan pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), disamping itu juga pada daerah tertentu daya beli masyarakat masih sangat rendah diakibatkan gagal panen di tingkat petani baik itu karena banjir ataupun kemarau yang panjang.
2. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :**
  - a. Masih banyaknya pekarangan yang belum dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga
  - b. Masih banyaknya kelompok pelaku usaha yang belum menerapkan GAP dan GHP sehingga standar mutu pangan segar masih belum memenuhi standar yang ditetapkan

#### • Solusi

1. **Bidang Sekretariat :** Perlu adanya dukungan dana yang optimal dalam perbaikan sarana dan prasarana pendukung kantor
2. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :**
  - a. Dibutuhkan kegiatan kios akses untuk menjamin ketersediaan pangan sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang berada di kawasan daerah rawan pangan
  - b. Dibutuhkan kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan terhadap masyarakat miskin yang berada di daerah rawan pangan

3. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** : dibutuhkan kegiatan Gelar Pangan Murah dalam menjamin kestabilan harga dan pasokan sehingga tidak terjadi lonjakan harga pangan
4. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** :
  - a. Dibutuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan secara optimal
  - b. Dibutuhkan kegiatan pengujian mutu pangan, sertifikasi dan registrasi untuk kelompok pelaku usaha sehingga produk-produk yang dihasilkan mempunyai daya saing dan memenuhi standar untuk dikonsumsi

### II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PANGAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. Indikator yang dikaji terkait dengan indikator kinerja hasil (output) yakni kinerja pelayanan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016, tentang Tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Pasal 2 dan 3 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pangan; penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan dan pusat informasi jagung meliputi kesekretariatan; bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; bidang distribusi, harga dan cadangan pangan; bidang konsumsi panganekaragaman dan keamanan pangan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pangan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sesuai target RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagaimana terlampir berikut ini :

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Skor PPH Ketersediaan			66.4	66.6	66.89	-	75.64	-			Sementara dalam proses penyusunan data Skor PPH Ketersediaan
2.	Skor PPH Konsumsi			82.3	84.4	86	-	90.7	75.5			



### II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN

#### 2.3.1. TINGKAT KINERJA PELAYANAN DAN HAL KRITIS YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DINAS PANGAN

Kinerja pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo kurun waktu 1 (satu) tahun yang lalu (2019) sebagai institusi/SKPD pembantu Gubernur di bidang Perencanaan Daerah dalam menyiapkan sumber referensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dengan input yang tersedia telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tahun 2020 yang keseluruhannya telah dirancang dan tuangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Hal ini memberikan keluaran bahwa pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo dapat terarah dan terukur setiap tahunnya.

Secara lebih spesifik dan komprehensif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang berperan dalam Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo telah menghasilkan berbagai dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan di Provinsi Gorontalo. Beberapa dokumen yang telah dihasilkan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, antara lain: dokumen Neraca Bahan Makanan, Analisis Pola Konsumsi, Analisis Pola Panen Bulanan, Analisis SKPG serta beberapa dokumen yang rutin disusun setiap tahun selain yang telah disebutkan di atas, antara lain: LKPJ Gubernur Gorontalo, LPPD, dan LAKIP.

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo adalah yang merupakan kelemahan (*weakness*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan pelayanan di bidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan akses distribusi produksi pangan menyebabkan biaya distribusi pangan menjadi tinggi.
2. Belum adanya gedung cadangan pangan pemerintah daerah sebagai penyangga pangan jika terjadi krisis pangan.
3. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan nasional.

4. Kurangnya data ekspor impor (keluar masuk) pangan antar wilayah maupun antar pulau sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
5. Menurunnya akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, menyebabkan terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus gizi kurang/buruk di wilayah tertentu.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum maksimal.
7. Belum tercapainya skor konsumsi, ketersediaan, mutu, keragaman pangan dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPh) Ideal.
8. Masih kurangnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal terutama konsumsi karbohidrat, gula, lemak, dan garam yang kurang/berlebihan menyebabkan *malagizi* ditandai dengan munculnya berbagai risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi kolesterol dan penyakit jantung.
9. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras sebagai makanan pokok.
10. Masih terjadinya kecenderungan konsumsi pada produk impor seperti terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal.
11. Masih besarnya ketergantungan penyediaan pangan khususnya buah, sayuran dan kacang-kacangan asal luar daerah.
12. Masih banyaknya pangan segar yang belum terjamin mutu dan keamanannya yang beredar di masyarakat.

### **2.3.2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN TAHUN 2019**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. Berikut ini beberapa masalah dan hambatan sehingga menjadi kondisi yang berpengaruh terhadap Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

#### **2.3.2.1. Peraturan Perundang-undangan**

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, maupun peraturan/keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik, sehingga dapat

menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sistem Manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain : PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004;
- b. Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan;
- c. Sistem pelaporan mengacu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BKPPIJ Provinsi Gorontalo. Terdapat beberapa uraian tugas yang menghambat terjadinya koordinasi yang baik antara bagian/bidang lingkup Dinas Pangan maupun bersama SKPD lain yang berada di lingkup Provinsi Gorontalo.

### 2.3.2.2 Sumber Daya Manusia Analis

Disamping masalah peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan diatas, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis yang baik serta akuntabel. Dari sisi kuantitas juga, Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menyediakan kualitas analisis yang berkualitas secara memadai. Disamping keterbatasan SDM perencanaan, hal yang sama berlaku untuk SDM Peneliti utamanya yang menguasai IT, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dengan Lembaga LITBANG, LSM yang berkompeten serta Perguruan Tinggi lainnya.

### II. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, maka dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kelima dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. RKPD tahun 2022 merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD maupun stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah dengan tetap mempedomani rencana strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Tema Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022 yakni **"Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju Unggul dan Sejahtera"**,

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022. Sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 visi yang diusung untuk pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode pemerintahan 2018-2022 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul**

**dan Sejahtera”.** Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:

**Gorontalo Maju dan Unggul,** Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

**Gorontalo Sejahtera,** yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtaq, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Lima Misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut merupakan solusi dirumuskan untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi oleh oleh Provinsi Gorontalo pada periode pemerintahan sebelumnya, yang dikerucutkan menjadi Lima Isu Strategis, yaitu:

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

### 3. Infrastruktur dasar dan strategis.

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

### 4. Kualitas sumber daya manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

### 5. Tata Kelola Pemerintahan.

Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (good governance).

Untuk mencapai sasaran RKPD 2022, maka arah kebijakan yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagaimana terlampir yang merupakan hasil review dan perbandingan antara program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2022 dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.



# BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

**Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Dinas Pangan Provinsi Gorontalo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10,188,844,813	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				12,654,644,813	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				8,199,155,743	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				8,613,155,743	
1.a	Program Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	74,952,000	Program Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	74,952,000	
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pangan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek (Dinas dan UPTD)	10 Aparat	74,952,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pangan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek (Dinas dan UPTD)	10 Aparat	74,952,000	
1.b	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	305,899,185	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	719,899,185	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	1 Kegiatan	305,899,185	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinas Pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	1 Kegiatan	305,899,185	
								Pengadaan Mobil Dinas Operasian	1 Unit	414,000,000	
1.c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	344,554,815	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)	100%	344,554,815	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu	1 Kegiatan	344,554,815	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pangan	Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu	1 Kegiatan	344,554,815	
			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)	6 dokumen				Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)	6 dokumen		

# BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

1.d	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	428,411,804	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	428,411,804	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia	4 Dokumen	428,411,804	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pangan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia	4 Dokumen	428,411,804	
			Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia	3 Dokumen				Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia	3 Dokumen		
1.e	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,045,337,939	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,045,337,939	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pangan Tahun 2022	Gaji 14 Bulan dan Tunjangan 13 Bulan	6,952,458,041	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pangan Tahun 2022	Gaji 14 Bulan dan Tunjangan 13 Bulan	6,952,458,041	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran	Dinas Pangan	Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD	2 Dokumen	92,879,898	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	Dinas Pangan	Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD	2 Dokumen	92,879,898	
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	27 Daerah Rawan Pangan	456,639,775	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	27 Daerah Rawan Pangan	456,639,775	
			Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)	2000				Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)	2000		
2.a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prov dan Kab/ Kota	tenaga pengelola analisis ketersediaan yang berkualitas	6 orang	75,559,969	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Prov dan Kab/ Kota	tenaga pengelola analisis ketersediaan yang berkualitas	6 orang	75,559,969	
			Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	7 Laporan				Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	7 Laporan		
-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota		Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		75,559,969	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota		Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		75,559,969	
2.b	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang ditangani Ketersediaan Pangannya		381,079,806	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang ditangani Ketersediaan Pangannya		381,079,806	

**BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU**

-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)	1500 Paket	274,539,834	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)	1500 Paket	274,539,834	
-	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kreawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)	20 Kios Akses Pangan	106,539,972	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kreawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)	20 Kios Akses Pangan	106,539,972	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	534,359,783	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,052,459,783	
			Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)				Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		
			Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	CPP 50 Ton, CPM 200 Ton				Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	CPP 50 Ton, CPM 200 Ton		
3.a	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan dan Jumlah Komoditas Pangan dengan Harga Stabil		254,768,519	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan dan Jumlah Komoditas Pangan dengan Harga Stabil		254,768,519	
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.	Sewa TTIC selama 1 Tahun	122,489,388	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.	Sewa TTIC selama 1 Tahun	122,489,388	
			Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil	5 Komoditi				Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil	5 Komoditi		

## BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU

-	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan	2 Laporan	132,279,131	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan	2 Laporan	132,279,131	
			Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan	5 ton CPM				Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan	5 ton CPM		
3.b	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	279,591,264	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	797,691,264	
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	CPPD 16 Ton	279,591,264	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	CPPD 16 Ton	279,591,264	
			Gudang Cadangan Pangan Provinsi	Pembangunan dan Pengisian				Gudang Cadangan Pangan Provinsi	Pembangunan dan Pengisian		
								Jumlah Lantai Jemur		518,100,000	
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kcal/kapita/hari)	2150	695,706,828	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kcal/kapita/hari)	2150	2,229,406,828	
			persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	56,6				persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	56,6		
			Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	5 Sertifikat/registrasi				Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	5 Sertifikat/registrasi		
4.a	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Kab / Kota dan Nas	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman		695,706,828	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Kab / Kota dan Nas	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman		2,229,406,828	

**BAB II – HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN TAHUN LALU**

	- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina	OPAL Dinas 1 Unit, P2L Taskin 100 Unit, Festival P2L, P2L Edukasi 5 Paket, P2L Gertam 1 Paket, P2L Hidroponik 10 Unit	606,790,259	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina	OPAL Dinas 1 Unit, P2L Taskin 100 Unit, Festival P2L, P2L Edukasi 5 Paket, P2L Gertam 1 Paket, P2L Hidroponik 10 Unit	606,790,259	
			Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	1 Kegiatan				Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	1 Kegiatan	1,533,700,000	
	- Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	2 Laporan	88,916,569	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH	2 Laporan	88,916,569	
			Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya	8 orang				Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya	8 orang		
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	5 Sertifikat/ registrasi	302,982,684	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	5 Sertifikat/ registrasi	302,982,684	
5.a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota	Dinas Pangan/ UPTD	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 sertifikat/ registrasi	302,982,684	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota	Dinas Pangan/ UPTD	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 sertifikat/ registrasi	302,982,684	
-	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan Keamanan Pangan		220,594,879	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Kelembagaan Keamanan Pangan		220,594,879	
-	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	6 Dokumen	82,387,805	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Prov dan Kab/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	6 Dokumen	82,387,805	

### 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, telah dilaksanakan forum OPD yang melibatkan seluruh *stakeholder* di bidang ketahanan pangan, baik Kementerian/Lembaga, SKPD Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK, LSM, ORMAS, Perguruan Tinggi, serta masyarakat. Forum yang telah dilaksanakan antara lain Focus Group Discussion (FGD) Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Gorontalo, CPCL, Forum OPD Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Musrenbangda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022.

Berbagai usulan *stakeholder* yang disampaikan dalam forum tersebut telah ditampung, diolah dan disesuaikan nomenklatur program dan kegiatannya, untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap masukan, usulan dan aspirasi berbagai *stakeholder* dan masyarakat terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2022 agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di daerah untuk dapat ditelaah dengan baik, sinkron, sinergi, efektif dan tepat sasaran.

## BAB III – TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN

**Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kegiatan Tahun 2022**

### Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi		Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman		
	Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman		
	- Penanggulangan Stunting		Jumlah Ibu Hamil dan Anak Balita yang menerima bantuan beras Nutrizinc	Jumlah Bantuan adalah : 1502 Orang x 33 Kg X Rp. 25.000.000 = Rp. 1.239.150.000	
				Sosialisasi B2SA dan Penyaluran Bantuan sejumlah Rp. 294.550.000	
			<b>Jumlah Total</b>	<b>1,533,700,000</b>	



### 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

#### 3.1.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs).

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka RENSTRA Kementerian yang ditelaah yaitu RENSTRA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI yang antara lain :

- (1) Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (2) Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
- (3) Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

- (4) Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
- (5) Penanganan keamanan pangan segar.

### **3.1.2. Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- 1 Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang;
- 2 Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam;
- 3 belum optimalnya kawasan strategis;
- 4 Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang;
- 5 Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang; 2) Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam; 3) belum optimalnya kawasan strategis; 4) Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang; dan 5) Keterbatasan infrastruktur wilayah.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan.

Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait

belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pangan yaitu : harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PANGAN

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2022 adalah terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian dan kelautan perikanan yang berdampak pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat, penyediaan pangan dengan harga terjangkau, peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sbb :

- Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## **BAB III – TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN**

- Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
  - Penyusunan Rencana Program, Data, monitoring dan evaluasi
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Gaji dan Tunjangan ASN
- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatannya adalah :
  - Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
  - Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
  - Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal
  - Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi
- Program Program Pengawasan Keamanan Pangan kegiatannya adalah :
  - Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

Tabel T-C.33. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Dinas Pangan Provisi Gorontalo

Kode	Rancangan Awal RKPD		RENCANA TAHUN 2022(TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target	Kebutuhan
				Capaian	Dana/Pagu			Capaian	Dana/Pagu
				Kinerja	Indikatif				Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10,188,844,813				12,072,833,825
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				8,199,155,743				9,019,071,317
2.09.01.1.05	Program Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)		100%	74,952,000	APBD			82,447,200
2.09.01.1.05.09	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek (Dinas dan UPTD)	Dinas Pangan	10 Aparat	74,952,000			10 Aparat	82,447,200
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)		100%	305,899,185	APBD			336,489,104
2.09.01.1.06.02	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia	Dinas Pangan	1 Kegiatan	305,899,185			1 Kegiatan	336,489,104
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD)		100%	344,554,815	APBD			379,010,297
2.09.01.1.08.04	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu	Dinas Pangan	1 Kegiatan	344,554,815			1 Kegiatan	379,010,297
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)		6 dokumen				6 dokumen	

2.09.01.1.01	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	428,411,804	APBD		100%	471,252,984
2.09.01.1.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia	Dinas Pangan	4 Dokumen	428,411,804			4 Dokumen	471,252,984
		Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia		3 Dokumen			3 Dokumen		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,045,337,939				7,749,871,733
2.09.01.1.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pangan Tahun 2022	Dinas Pangan	Gaji 14 Bulan dan Tunjangan 13 Bulan	6,952,458,041				7,647,703,845
2.09.01.1.02.07	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triulan/semesteran	Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD	Dinas Pangan	2 Dokumen	92,879,898			2 Dokumen	102,167,888
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya		27 Dacrah Rawan Pangan	456,639,775	APBD		27 Dacrah Rawan Pangan	502,303,753
		Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)		2000				2000	
2.09. 04. 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	tenaga pengelola analisis ketersediaan yang berkualitas	Dinas Pangan	6 orang	75,559,969			6 orang	83,115,966
		Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		7 Laporan			7 Laporan		
2.09. 04. 1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kab/Kota	Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			75,559,969				83,115,966

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN

2.09. 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rawan Pangan yang ditangani Ketersediaan Pangannya	Dinas Pangan		381,079,806				419,187,787
2.09. 04 1.02.01	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien)	Kabupaten/ Kota	1500 Paket	274,539,834			2000 paket	301,993,817
2.09.04 1.02 .02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Krawanan 2. Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)	Kabupaten/ Kota	20 Kios Akses Pangan	106,539,972			27 LKD	117,193,969
2.09. 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen		Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	534,359,783	APBD		Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	453,057,435
		Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)				CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%,	
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat		CPP 50 Ton, CPM 200 Ton				CPP 50 Ton, CPM 200 Ton	
2.09. 03. 1.01	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan dan Jumlah Komoditas Pangan dengan Harga Stabil	Kabupaten/ Kota		254,768,519				280,245,371
2.09. 03. 1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.		Sewa TTIC selama 1 Tahun	122,489,388			8 Gpkn	134,738,327
		Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil		5 Komoditi				5 Komoditi	

2.09. 03. 1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan		2 Laporan	132,279,131			2 Laporan	145,507,044
		Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan		5 ton CPM				100 Ton	
2.09. 03. 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan	Kabupaten/ Kota	CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	279,591,264			CPP 50 Ton & CPM 100 Ton	307,550,390
2.09. 03. 1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan		CPPD 16 Ton	279,591,264				
		Gudang Cadangan Pangan Provinsi		Pembangunan dan Pengisian				Pengisian	
2.09. 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kcal/kapita/hari)		2150	695,706,828	APBD		2150	1,765,120,368
		persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)		56,6				56,6	
		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan		5 Sertifikat/ registrasi				5 Sertifikat/ registrasi	
2.09. 03. 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Kabupaten/ Kota dan Nasional		695,706,828				765,277,511
2.09. 03. 1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina	Kabupaten/ Kota	OPAL Dinas 1 Unit, P2L Taskin 100 Unit, Festival P2L, P2L Edukasi 5 Paket, P2L Gertam 1 Paket, P2L Hidroponik 10 Unit	606,790,259				667,469,285
		Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman							
2.09. 03. 1.04.03	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan 3 Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG melalui Media Promosi	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH		2 Laporan	88,916,569				97,808,226
		Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya		8 orang					

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PANGAN

2.09. 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan		5 Sertifikat/ registrasi	302,982,684				333,280,952
2.09. 05. 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 1 Pangan Segar Distribusi Lintas Sektor Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pangan/ UPTD	5 sertifikat/ registrasi	302,982,684			6 Dokumen	333,280,952
2.09. 05. 1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Dokumen Kelembagaan Keamanan Pangan	UPTD BPMKP		220,594,879				242,654,367
2.09. 05. 1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pangan	6 Dokumen	82,387,805			5 sertifikat/ registrasi	90,626,586

Program Dinas Pangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan. Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pangan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pangan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, KPBU, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Selanjutnya untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pangan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran cetakan Renja SIPD.



### **V.1. Catatan Penting**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Gorontalo 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Organisasi Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

### **V.2. Kaidah Pelaksanaan :**

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Di dalam penyusunan Renja tahun 2022 masih belum sempurna, dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi, harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi Gorontalo, RKPD Provinsi Gorontalo dan Renstra OPD).

### V.3. Rencana Tindak Lanjut :

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana OPD Dinas Pangan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Semoga Dokumen Renja Dinas Pangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Gorontalo, Juli 2022

**KEPALA DINAS**



**SUTRISNO, A.Pi, M.Si**

NIP. 19630425 198603 1 018

